

## **Implementasi Wisata Halal Indonesia: Polemik *Center of Halal Tourism* di Kota Malang**

Anysa Puspita Hidayati<sup>1\*</sup>, Siti Faizatun Nisa<sup>2</sup>, Antik Hamidah<sup>3</sup>, Yovita Novia Ule<sup>4</sup>  
<sup>1234</sup>Universitas Negeri Malang

\*anysa.puspita.2104216@students.um.ac.id

### **Abstrak**

Salah satu sektor pariwisata yang berkembang di Indonesia selama beberapa tahun terakhir adalah wisata halal khususnya pada beberapa daerah di Indonesia. Kota Malang merupakan salah satu daerah yang terpilih sebagai tempat unggulan wisata halal yang menjadi sasaran wisatawan asing maupun domestik. Sebagai daerah unggulan wisata halal, Kota Malang memiliki program pengembangan wisata halal yaitu *Center of Halal Tourism*. Program ini memunculkan beberapa polemik di Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari wisata halal beserta polemiknya terutama di Kota Malang dalam penerapan *Center of Halal Tourism*. Penelitian ini menggunakan metode naratif dengan menerapkan literature review melalui buku, jurnal, artikel online mengenai wisata halal di Kota Malang beserta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Center of Halal Tourism* di Kota Malang merupakan program yang lebih fokus kepada dunia pariwisata agar mendukung konsep wisata halal sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan khususnya muslim mancanegara maupun domestik selama mengunjungi wisata di Kota Malang. Program ini menjadikan Malang sebagai wisata halal unggulan serta membawa dampak positif bagi masyarakat Kota Malang dengan mengubah gaya hidup serta meningkatkan perekonomian di Kota Malang. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mengembangkan program tersebut di antaranya menyusun DSRA (Desain Strategi Rencana Aksi); melakukan sertifikasi halal dan kegiatan bimbingan teknis; serta memberikan klarifikasi terkait kesalahpahaman isu *halal city*. Selain dari pemerintahan, terdapat juga beberapa pihak yang turut terlibat dalam upaya pengembangan program *Center of Halal Tourism* ini.

**Kata Kunci:** Wisata Halal, Polemik, Kota Malang

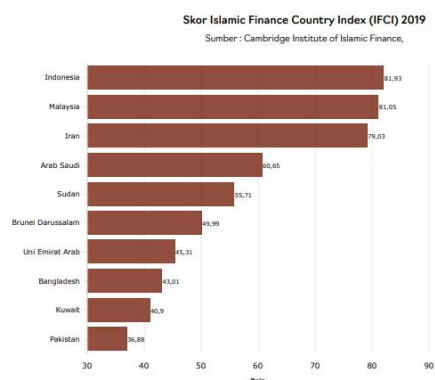
### **Abstract**

*One of the tourism sectors that has developed in Indonesia over the last few years is halal tourism, especially in several regions in Indonesia. Malang City is one of the areas selected as a leading place for halal tourism which is targeted by foreign and domestic tourists. As a leading area for halal tourism, Malang City has a halal tourism development program, namely the Center of Halal Tourism. This program gave rise to several polemics in Malang City. The purpose of this study is to find out how the implementation of halal tourism and its polemics, especially in the city of Malang in the application of the Center of Halal Tourism. This study uses a narrative method by applying a literature review through books, journals, online articles about halal tourism in Malang City along with other references related to the object of research. The results showed that the Center of Halal Tourism program in Malang City is a program that focuses more on the world of tourism in order to support the concept of halal tourism so that it can provide comfort for tourists, especially foreign and domestic Muslims while visiting tourism in Malang City. This program makes Malang a leading halal tourism and has a positive impact on the people of Malang City by changing their lifestyle and improving the economy in Malang City. The government has made several efforts in developing the program, including preparing the DSRA (Strategic Action Plan Design); perform halal certification and technical guidance activities; as well as clarifying and understanding the misunderstanding of the halal city issue. Apart from the government, there are several parties involved in developing the Center of Halal Tourism program.*

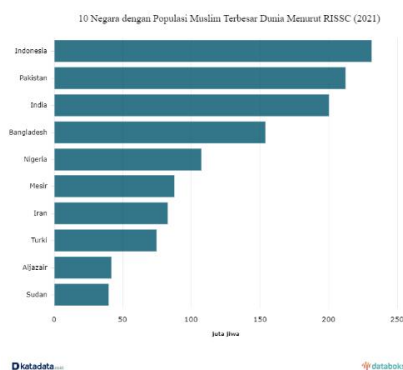
**Keywords:** Halal Tourism, Polemic, Malang City

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 1990-an, Indonesia tak asing lagi dengan industri halal dengan munculnya perbankan syariah. Titik inilah yang menjadi babak awal perjalanan sektor industri halal di negara ini. Indonesia berhasil mencatat skor 81,93 dan menempati peringkat pertama pada *Islamic Finance Country Index (IFCI)* tahun 2019 pada penghargaan *Global Islamic Finance Report (GIFR)* dalam Pasar Keuangan Syariah Global setelah setahun sebelumnya mencapai peringkat ke-6. Selain itu pada industri halal lain, data yang dihimpun dari *Global Islamic Economy Report 2020/2021* menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pengeluaran konsumen muslim di Indonesia meliputi makanan, minuman, farmasi dan kosmetik serta pariwisata ramah muslim dan gaya hidup halal mencapai nilai US\$2,02 triliun, yang menjadikan Indonesia berada pada posisi pertama atas konsumsi produk halal dengan nilai US\$144 miliar, posisi ke-6 pada sektor pariwisata ramah muslim dengan nilai US\$11,2 miliar, posisi ke-3 sektor busana muslim (fashion) dengan nilai US\$16 miliar, posisi ke-6 pada sektor farmasi dengan total konsumsi US\$5,4 miliar dan posisi ke-2 untuk sektor kosmetik halal dengan konsumsi sebesar US\$4 miliar (Mulyani, 2021). Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari besarnya potensi industri halal di negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Data yang dipublikasikan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* pada tahun 2021 menunjukkan terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama muslim. Jumlah ini memenuhi 86,7% dari keseluruhan populasi di Indonesia dan 11,92% dari total populasi muslim dunia (Kusnandar, 2021).



**Gambar 1. Peringkat Pengembangan Keuangan Syariah di Dunia Menurut IFCI Tahun 2019**  
Sumber: Katadata.id (2019)



**Gambar 2. 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar di Dunia Menurut RISSC Tahun 2021**  
Sumber: Katadata.id

Pencapaian industri halal dalam berbagai sektor menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia atas penggunaan produk dan jasa halal semakin meningkat. Hal ini menjadi motivasi pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah strategis dalam pengembangan industri halal, dikutip dari penjelasan Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan pada catatan perdagangan produk halal, melakukan pengembangan kodifikasi data industri halal, membentuk sistem sertifikasi halal dan ekspor yang mudah serta efisien dan melakukan pembangunan kawasan industri halal atau zona halal dengan mencetuskan adanya wisata halal pada berbagai daerah di Indonesia.

Sektor wisata halal relatif baru dalam kajian pariwisata yang ada di Indonesia dan cukup ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Dengan banyaknya pihak yang mengartikan wisata halal, maka dikutip dari penjelasan Zainut Tauhid selaku Wakil Menteri Agama diketahui bahwa wisata halal merupakan layanan atau fasilitas yang diberikan bagi wisatawan khususnya wisatawan muslim agar dapat menjalankan kewajiban syariatnya di lokasi wisata tersebut. Jadi, adanya wisata halal dapat menjadi alternatif terbaik bagi wisatawan muslim karena mereka dapat berwisata sekaligus memenuhi kebutuhan spiritualnya dengan mudah (Sendari, 2022). Konsep pengembangan pariwisata halal yang diterapkan ini seperti memberikan layanan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah yang berkualitas, bebas dari Islamophobia, memberi nilai manfaat sosial, bebas dari aktivitas non halal, dan memberikan pengalaman unik bagi wisatawan muslim. Menurut Kamenparekraf, prospek wisata halal di Indonesia sangatlah kuat bahkan Indonesia telah diakui dunia dalam pengembangannya. Maka dari itu, wisata halal sudah diterapkan di beberapa daerah hingga menarik kedatangan wisatawan muslim sekitar 14,92 juta turis. Terdapat beberapa daerah yang telah berhasil mengimplementasikan konsep wisata halal bahkan telah diakui terbaik di dunia, seperti Lombok yang pada tahun 2015 pernah dinobatkan sebagai *The World Best Halal Tourism Destination* dalam ajang *World Halal Travel Awards* di Abu Dhabi, lalu juga ada Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan DKI Jakarta.

Dilihat dari prospek wisata halal yang bagus maka tidak menutup kemungkinan di dalam penerapannya menuai pro dan kontra dari masyarakat setempat. Implementasi wisata halal yang menuai polemik dan masih hangat di tengah perbincangan masyarakat yaitu terkait pencanangan wisata halal di Kota Malang. Problematika yang ada didalam konsep *Center of Halal Tourism* di kota Malang ini sebenarnya ialah kesalahpahaman perspektif publik. Pemerintah Kota Malang berulang kali menegaskan bahwa program wisata halal merupakan usaha untuk menggaet wisatawan mancanegara muslim untuk datang ke Kota Malang namun sifatnya komplementer dan tidak perlu didukung dengan Perda syariah agar tidak adanya kontraproduktif. Penegasan yang dilakukan oleh Pemkot Malang ini dikuatkan lagi dengan pendapat dari ekonom senior, Joko Budi Santoso, mengatakan jika sebenarnya fokus dari program wisata halal yakni memberikan akses mudah untuk wisatawan menemukan fasilitas beribadah, produk makanan dan minuman halal, serta layanan halal lainnya. Namun sangat disayangkan, menurut berita bisnis.com bahwa puluhan warga Kota Malang yang mengatasnamakan dirinya sebagai ormas Malang menentang adanya program tersebut dengan memasang banner yang berisi slogan "Malang Tolerant City, Not Halal City" di depan gedung DPRD Kota Malang.

Problematika di atas memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi perkembangan wisata halal di Indonesia terutama Kota Malang. Beberapa jurnal, artikel, dan berita mengenai polemik wisata halal di Kota Malang telah memberikan wawasan yang berguna tentang peran dan rencana pemerintah dalam program *Center of Halal Tourism* beserta

dengan pandangan publik terhadap program tersebut, namun tinjauan dari beberapa sumber belum mengulas perkembangan polemik tersebut beserta solusi yang dilakukan pemerintah secara jelas. Adanya penelitian ini bertujuan untuk memperluas ulasan sebelumnya dan untuk berkontribusi pada literatur penelitian implementasi wisata halal. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi dan meninjau sumber yang terkait dengan industri dan wisata halal. Dari data tersebut, peneliti akan mengkaji bagaimana tanggapan dan peran pemerintah dengan adanya polemik dalam penerapan wisata halal. Pada bagian terakhir, peneliti akan menawarkan kesimpulan dan ulasan dalam penelitian ini yang akan memberikan pandangan baru mengenai wisata halal di masa depan dalam bidang ekonomi syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode naratif dengan menerapkan *literature review* atau tinjauan pustaka. *Literatur review* merupakan suatu metode yang terstruktur, terperinci dan reproduktibel yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi terhadap karya tulis hasil peneliti terdahulu (Ulhaq & Rahmayanti, 2020). Pada penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, misalnya lewat perantara atau lewat dokumen penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari buku, jurnal, berita online, dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Maka dari itu, ulasan kami merupakan publikasi yang secara eksplisit terkonsentrasi pada industri halal dalam sektor pariwisata dengan spesifikasi pada satu wilayah sehingga pencarian dimulai dengan istilah “industri halal”, “wisata halal” “pro dan kontra wisata halal”, “prospek wisata halal”, “implementasi wisata halal”, “prospek wisata halal”, “dan “wisata halal di Malang”. Berdasarkan pencarian tersebut, kami mengidentifikasi beberapa pokok pembahasan seperti bagaimana industri halal di Indonesia; bagaimana prospek wisata halal; sejauh mana wisata halal diterapkan; bagaimana implementasi wisata halal di Kota Malang; bagaimana tanggapan masyarakat terkait wisata halal; dan apa saja kendala dalam penerapan wisata halal. Review tersebut memudahkan peneliti untuk menganalisis berbagai sumber yang didapat untuk menyimpulkan hasil dari penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dapat menghindari pemikiran khusus dari penulis karena informasi yang ditemukan dalam penelitian merupakan hasil interpretasi dari peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prospek Wisata Halal di Indonesia**

Komunitas muslim yang semakin meningkat dari hari ke hari menjadikan peluang berkembangnya wisata halal di Indonesia terbuka lebar. Banyak negara yang sebagian besar merupakan penduduk muslim seperti Malaysia, Indonesia serta negara-negara Timur Tengah dijadikan sebagai tujuan wisata halal. Peluang ini kemudian dikembangkan untuk memicu meningkatnya kunjungan para wisatawan muslim mancanegara ke Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya prestasi, dimana Indonesia menempati peringkat pertama dari 130 negara peserta menurut *Global Muslim Travel Index* (GMT) sebagai tujuan wisata halal terbaik pada tahun 2019. Prestasi itu membawa keuntungan bagi Indonesia, dimana semakin banyak wisatawan muslim yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan muslim mancanegara di Indonesia mencapai 20% atau 14,92 juta pengunjung. Dari jumlah pengunjung tersebut membawa dampak positif bagi Indonesia di antaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan total dedikasi dari GDP

mencapai 10,4%, meningkatnya US\$ 1,5 triliun untuk wisatawan asal luar negeri serta US\$ 3,9 triliun untuk wisatawan dalam negeri sebagai pengeluaran wisatawan dan, berdedikasi dalam menarik 313 juta jiwa terhadap ketenagakerjaan. Selain itu, wisata halal juga membawa manfaat bagi UMKM yang berada di sekitar lokasi wisata halal dimana para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha dengan menjual produk-produk halal kekhasan daerah wisata halal yang diminati oleh wisatawan muslim mancanegara. Kunjungan wisatawan muslim diprediksi oleh hasil catatan masyarakat ekonomi syariah akan semakin meningkat pada tahun 2024 dimana untuk kunjungan wisatawan muslim domestik mencapai 5,8 % atau setara 353,8 juta pengunjung. Sedangkan untuk wisatawan muslim mancanegara mencapai 7,5% atau setara 24 juta.

### **Implementasi Wisata Halal di Indonesia**

Beberapa daerah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan konsep wisata halal dengan baik seperti di daerah Aceh, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk mendukung pengembangan wisata halal seperti menyebarluaskan eksistensi hotel syariah; melakukan sertifikasi halal pada restoran-restoran dan tempat makan; serta melakukan sertifikasi halal pada makanan dan minuman yang ada di Indonesia melalui MUI (Faridah & Satriana, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elpa Hermawan terdapat tiga strategi yang dibangun pemerintah dalam mewujudkan wisata halal. Strategi tersebut yakni menyediakan fasilitas dan layanan wisata halal sesuai dengan syariat Islam; menggunakan internet sebagai media penyebaran pengenalan wisata halal sehingga dapat sampai ke tingkat internasional; serta berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung konsep dan jasa layanan wisata halal yang mampu menarik para wisatawan (Hermawan, 2018).

Strategi di atas dapat mempermudah penerapan wisata halal di setiap daerah, seperti penerapan wisata halal di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan penelitian M. Sahli dan Retnowati secara garis besar menunjukkan bahwa Nusa Tenggara Barat sangat antusias dalam mengonsepsi wisata halal dengan didukung oleh beberapa peraturan daerah yang mengatur secara keseluruhan kegiatan industri kepariwisataan (Sahli & Tuti, 2021). Peneliti telah menunjukkan sisi mudah dalam konsep wisata halal versi pemerintah NTB yang terfokus pada perbaikan kualitas dari fasilitas umum yang dimulai dari hal yang paling kecil hingga paling pokok, seperti adanya penunjuk arah kiblat di setiap masjid dan kamar hotel serta tersedianya tempat wudhu yang nyaman sehingga umat muslim tidak merasa khawatir dalam melakukan ibadahnya.

### **Implementasi Wisata Halal di Kota Malang**

Beralih dari konsep wisata halal daerah NTB, pemerintah Kota Malang memiliki cara tersendiri dalam implementasi wisata halal di daerahnya dengan mengelola potensi Kota Malang dalam bidang pariwisata dengan meluncurkan konsep "Center of Halal Tourism". Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Malang telah menyusun DSRA (Desain Strategi Rencana Aksi) sebagai perwujudan implementasi rencana wisata halal. Penyusunan DSRA tersebut melibatkan beberapa pihak seperti, pemerintah Kota Malang; pelaku usaha, serta *Halal Center* seperti universitas-universitas yang berada di Kota Malang (Umiyati & Tamrin, 2020). Selain itu, Pemerintah Kota Malang juga telah melakukan beberapa upaya demi mewujudkan wisata halal di Kota Malang seperti melakukan sertifikasi halal untuk restoran, hotel, dan kafe; mengadakan bazar wisata halal pada tahun 2018 dan 2019; melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) "Sistem Jaminan Halal"; serta membuat paket-paket wisata halal seperti "Pesona

Bromo Halal" (Rahmadian & Anam, 2021). Implementasi wisata halal di Kota Malang tersebut didukung oleh infrastruktur dan fasilitas sarana prasana di kota Malang yang telah memadai serta didukung dengan adanya peluang besar lain seperti fakta bahwa wisata halal telah populer di pasar manca negara; meningkatnya kesadaran masyarakat dalam gaya hidup halal; dan variasi daya tarik wisatawan manca negara terhadap konsep wisata halal (Rahmadian & Anam, 2021). Akan tetapi, di dalam peluang yang besar juga terdapat tantangan yang besar. Tantangan yang harus dihadapi dalam aksi implementasi wisata halal adalah daya saing kualitas sarana prasarana daerah lain yang tidak kalah unggul; program wisata halal yang terhambat karena adanya pandemi dan tantangan utama yakni perspektif masyarakat terhadap wisata halal yang masih bias. Tantangan tersebut menjadi hambatan-hambatan dalam aksi pemerintah Kota Malang menerapkan konsep wisata halal.

### **Pro dan Kontra Wisata Halal di Kota Malang**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang sempat membahas tentang tantangan unik yang dihadapi setiap daerah dalam implementasi wisata halal yang paling utama yakni perspektif masyarakat. Banyak kalangan masyarakat terutama pelaku ekonomi menganggap bahwa brand halal atau adanya wisata halal ini hanya milik wisatawan yang beragama islam dan akhirnya mempersempit jangkauan pasar (Nurlatifah, 2020). Tantangan tersebut juga menjadi pro dan kontra dalam penerapan program "Center of Halal Tourism" di Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji dalam berbagai kesempatan mengungkapkan rencana ingin menjadikan Kota Malang sebagai "Center of Halal Tourism" dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)-nya. Konsep Malang Halal ini bukan tentang penerapan syariat agama tertentu tetapi tentang upaya pencapaian Kota Malang agar meraih potensi besar wisata halal dunia yang sudah dirintis sejak lama. Akan tetapi, tindakan pemerintah Kota Malang belum sepenuhnya mendapat persetujuan dari sebagian masyarakat Malang.

Baru-baru ini pernyataan Wali Kota Malang terkait *Halal City* menimbulkan kontroversi. Warga Kota Malang yang mengatasnamakan gabungan ormas Malang bahkan sempat memasang spanduk bertuliskan "Malang Tolerant City, Not Halal City" sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut. Kontra terhadap wacana *Halal City* juga disampaikan oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Malang Harvard Kurniawan, bahwa Kota Malang belum memiliki regulasi (perda) mengenai *Halal City* dan hadirnya perda itu pun dianggap bertentangan dengan perundang-undangan dan mengganggu kondisi Kota Malang sebagai kota kondusif yang menjalankan toleransi dan selalu menjunjung pluralisme. Beliau khawatir kebijakan wali kota Malang ini hanya untuk kepentingan satu kelompok tertentu dan berniat melawan Pancasila sebagai dasar negara (Kabarmalang, 2022). Kontra tersebut sebenarnya pernah ditanggapi oleh Wali Kota bahwa program wisata halal merupakan usaha untuk menggaet wisatawan mancanegara muslim untuk datang ke Kota Malang namun sifatnya komplementer dan tidak perlu didukung dengan Perda syariah agar tidak adanya kontraproduktif. Tanggapan tersebut dirasa cukup untuk menghindari perdebatan antara pemerintah dengan masyarakat mengenai wisata halal.

### **Tanggapan dan Peran Berbagai Pihak**

Sutiaji selaku wali kota Malang memberikan komentar terkait dengan pemasangan spanduk bertuliskan "Malang Tolerant City Not Halal City" dan mengatakan dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang aneh-aneh seperti *Halal City* (Perdana, 2022). Menurutnya publik memiliki persepsi yang keliru karena yang dimaksudkan dalam pidatonya adalah Malang Halal sesuai dengan *The Future of Malang* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang salah satunya mengenai konsep Malang Halal yang

diwujudkan dalam hal kepariwisataan melalui *Center of Halal Tourism*. Sutiaji juga meminta agar tidak ada pihak yang mengaitkan hal ini dengan isu SARA (Perdana, 2022). Agung H. Buana selaku Kasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kota Malang mengeluarkan pendapat serupa, menurutnya masyarakat umum terutama masyarakat Kota Malang masih memiliki pemahaman yang bias terhadap wisata halal. Pernyataan Agung H. Buana juga diperkuat Sari Lenggogeni yang merupakan pakar pariwisata yang berasal dari Universitas Andalas bahwa isu mengenai wisata halal pada umumnya masih sukar untuk dipahami oleh masyarakat (Ferdiansyah, 2020). Oleh karena itu, masyarakat menolak adanya wisata halal karena masyarakat masih belum bisa membedakan antara wisata halal dengan wisata religi sehingga adanya misinterpretasi pada masyarakat ketika pemerintah akan mengadaptasi wisata halal. Makna sebenarnya dari wisata halal yakni bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi wisatawan muslim melakukan ibadah dengan tenang dan nyaman saat berwisata, selain itu alasan pemerintah mengadaptasi wisata halal yakni pemerintah melihat potensi signifikan dalam pertumbuhan muslim yang ada di berbagai negara. Sayangnya, masyarakat memiliki pemikiran yang berbeda dimana asumsi mereka adalah wisata halal tidak penting karena Indonesia adalah negara mayoritas muslim yang secara tidak langsung semua yang dipakai, dijual, dan dikonsumsi tentunya berstatus halal dan adanya wisata halal ini sama saja dengan wisata religi.

Sebelumnya diketahui Satpol PP Kota Malang telah mencopot spanduk-spanduk bernada protes bertuliskan "Malang Tolerant City Not Halal City" di depan Kantor Balai Kota Malang dan beberapa titik ruas jalan yang dipajang oleh gabungan ormas Malang, meski belakangan juga diketahui bahwa spanduk tersebut dipasang kembali sebagai bentuk ketidakpuasan atas klarifikasi yang disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji (Hida, 2022). Dalam hal ini pemerintah Kota Malang telah memberikan penjelasan dan meluruskan persepsi masyarakat yang kurang tepat. Pihaknya menekankan untuk tidak membuat diksi bahwa konsep Malang Halal adalah Malang Syar'i dan mengingatkan bahwa sudah pernah dilakukan diskusi publik terkait program Malang Halal pada tahun 2018 dan tidak terjadi permasalahan pada saat itu. Namun meski demikian masih banyak pihak yang belum puas dan menuntut untuk diajak berdiskusi serta didengar aspirasinya. Kini meski mendapatkan banyak pertentangan dalam pelaksanaannya, namun konsep wisata halal yang digagas oleh Pemerintah Kota Malang masih terus berjalan. Pemkot Malang berupaya mematangkan konsep wisata halal dengan turut serta mendorong para pelaku dan pengelola usaha untuk segera mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, Pemkot Malang juga sudah menetapkan salah satu pasar untuk dijadikan proyek percontohan pasar halal yaitu Pasar Bunul di Kecamatan Blimbing.

Selain tanggapan pemerintah, dalam menerapkan wisata halal adanya peran pelaku ekonomi. Banyak sektor ekonomi yang menerapkan wisata halal bahkan sebelum adanya perencanaan "Center of Halal Tourism" seperti Hotel Ijen *Suites* yang di setiap kamarnya menyediakan alat sholat di setiap kamarnya lalu ada juga rumah makan "Gang Jangkrik" yang memiliki dua tempat restoran dimana memisah antara makanan halal untuk konsumen muslim dan nonmuslim serta ada tempat khusus makanan yang mengandung babi atau tidak halal untuk konsumen non-muslim. Hal tersebut mendukung adanya wisata halal di Kota Malang.

## SIMPULAN

Polemik wisata halal di Kota Malang terjadi karena adanya perbedaan antara persepsi masyarakat dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Malang. Pihak kontra menafsirkan program *Center of Halal Tourism* sebagai bentuk praktik

intoleransi dan kurang perlu dilakukan karena Kota Malang yang sudah kondusif akan konsep halal. Di lain sisi, tujuan dari Pemerintah Kota Malang adalah berupaya untuk meraih potensi besar dan ikut bersaing dalam pasar wisata halal baik dengan sasaran wisatawan muslim domestik maupun manca negara. Dalam mengatasi problematika ini Pemerintah Kota Malang memberikan pemahaman dan klarifikasi kepada masyarakat serta meminta agar tidak ada pihak yang mengaitkan permasalahan ini dengan isu SARA. Namun belum adanya wacana diskusi terbaru secara langsung membuat beberapa pihak yang mengatasnamakan dirinya masyarakat Kota Malang merasa belum didengar aspirasinya. Kini meski mendapatkan banyak kontra dan kritikan namun Pemerintah Kota Malang tetap berpegang pada rencana awal dan konsep wisata halal yang telah digagas terus berjalan dan dimatangkan.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu ketersediaan sumber literatur terakreditasi yang fokus mengkaji problematika di Kota Malang. Peneliti juga memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak memiliki banyak metode penelitian untuk dipilih dan tidak memungkinkan untuk menggunakan metode penelitian lain seperti melakukan wawancara yang hasilnya lebih akurat dan terkini. Penelitian ini menyarankan penelitian selanjutnya dapat mengkaji permasalahan ini dengan metode lain yang lebih relevan dan dapat menghadirkan keadaan terkini yang sesuai dengan kondisi lapangan yang terbaru. Implikasi penting penelitian ini bagi Pemerintah Kota Malang untuk lebih memerhatikan aspirasi masyarakat dan penyesuaian pemahaman mengenai konsep wisata halal antara masyarakat dan pemerintah sehingga penyelenggaraan program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah lain yang juga memiliki rencana untuk membuat daerahnya menjadi wisata halal agar tidak mengalami problematika serupa.

## REFERENCES

- Carep-01. (2022). Terkait *Halal City*, Harvard: Wali Kota Malang Gagal Paham, Lupa Sejarah. Diperoleh dari <https://kabarmalang.com/29900/terkait-halal-city-harvard-wali-kota-malang-gagal-paham-lupa-sejarah>. Diakses pada tanggal 27 April 2022.
- Ferdiansyah, H., Endyana, C., Rachmat, H., & Khadijah, U. L. S. (2020). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism. *Journal of Sustainable Tourism Research*, 2(1), 30 – 34. doi:<https://doi.org/10.24198/tornare.v2i1.25831>
- Fitrianto. 2019. Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 7(1), 69-79. doi:<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v7i1.5254>
- Ghifari, Ahmad. (2019). Pertahankan Posisi sebagai Destinasi Wisata Halal, Berikut Strategi Pemerintah. Diperoleh dari <https://amp.kontan.co.id/news/pertahankan-posisi-sebagai-destinasi-wisata-halal-berikut-strategi-pemerintah>. Diakses pada tanggal 28 April 2022.
- Henry. (2021). Apa Konsep Wisata Halal Versi Kementerian Agama?. Diperoleh dari <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4716765/apa-konsep-wisata-halal-versi-kementerian-agama>. Diakses pada tanggal 19 April 2022.
- Hermawan, E. (2019). Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 7(2), 87 – 95. doi: <https://doi.org/10.33366/ref.v7i2.1512>
- Hida, Taufik El. (2022). Akhirnya, Spanduk Bertuliskan 'MALANG TOLERANT CITY NOT HALAL CITY' Dicapot Satpol PP. Diperoleh dari <https://www.klikanggaran.com/peristiwa/pr-1152704851/akhirnya-spanduk-bertuliskan->

- malang-tolerant-city-not-halal-city-dicopot-satpol-pp. Diakses pada tanggal 28 April 2022.
- Hidayah, S. N. (2019). Prospek wisata halal Indonesia di kancah global. Diperoleh dari <https://www.alinea.id/kolom/prospek-wisata-halal-indonesia-di-kancah-global-b1Xgf9jV6>. Diakses pada tanggal 18 April 2022.
- Jannah, R. (2020). Urgensi dan Problematika Pelaksanaan Pariwisata Halal. Naskah Publikasi, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta). Diperoleh dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/35580/NASKAH%20PUBLIKA%20SI%20.pdf?sequence=10&isAllowed=y>.
- Katadata. (2020). Industri Halal Untuk Semua. Diperoleh dari <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua>. Diakses pada tanggal 12 April 2022.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Sektor Industri Halal Memiliki Potensi Besar dalam Perekonomian Nasional. Diperoleh dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sektor-industri-halal-memiliki-potensi-besar-dalam-perekonomian-nasional/>. Diakses pada tanggal 12 April 2022.
- Kusnandar, V. B. (2021). RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia. Diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>. Diakses pada tanggal 12 April 2022.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Global Islamic Finance Report 2019 Menempatkan Indonesia di Posisi Teratas dalam Pasar Keuangan Syariah Global. Siaran Pers. Diperoleh dari <https://knks.go.id/storage/upload/1571570175-Siaran%20Pers%20Penghargaan%20GIFR%202019.pdf>. Diakses pada tanggal 12 April 2022.
- Kompas.com. (2022). Bantah Keluarkan Wacana soal Malang *Halal City*, Wali Kota Sutiaji: Jangan Kaitkan dengan SARA. Diperoleh dari <https://surabaya.kompas.com/read/2022/02/18/183125578/bantah-keluarkan-wacana-soal-malang-halal-city-wali-kota-sutiaji-jangan?page=1>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2022.
- Leatemia, L. A. (2020). *Penerapan Halal Tourism dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kota Malang*. Skripsi, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya,). Diperoleh dari [http://digilib.uinsby.ac.id/45501/2/Lenny%20Agustina%20Leatemia\\_G94216111.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/45501/2/Lenny%20Agustina%20Leatemia_G94216111.pdf)
- Lidwina, A. (2019). Indonesia Peringkat 1 Dunia dalam Pengembangan Keuangan Syariah. Diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/07/indonesia-peringkat-satu-dunia-dalam-pengembangan-keuangan-syariah>. Diakses pada tanggal 20 April 2022.
- M, Avirisda. (2022). Heboh Soal *Halal City* Malang, Walikota beri Klarifikasi. Diperoleh dari <https://www.idxchannel.com/syariah/heboh-soal-halal-city-malang-wali-kota-beri-klarifikasi/2>. Diakses pada tanggal 27 April 2022.
- Nurhaliza, S. (2021). “Kembangkan Pariwisata Halal, Potensi Kunjungan Wisman Muslim Capai 24 Juta Orang di 2024. Diperoleh dari <https://www.idxchannel.com/syariah/kembangkan-pariwisata-halal-potensi-kunjungan-wisman-muslim-capai-24-juta-orang-di-2024>, diakses pada tanggal 20 April 2022.
- Nurlatifah, I. (2020). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta.

- Puspasyifa. (2022). Perkembangan Produk Halal di Indonesia. Diperoleh dari <https://hot.liputan6.com/read/4907863/wisata-halal-di-indonesia-pengertian-konsep-dan-destinasinya>. Diakses pada tanggal 12 April 2022.
- Rahmadian, A. & Anam, M. M. (2021). Prospek Wisata Halal di Kota Malang: Sebutan Tinjauan atas Peluang dan Tantangan. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 6(1), 17 – 25. doi: <https://doi.org/10.26905/jpp.v6i1.5587>
- Rahmadi, Novianto. (2021). Potensi Sektor Industri Halal di Indonesia. Diperoleh dari <https://disperindag.kukarkab.go.id/berita/artikel/potensi-sektor-industri-halal-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 20 April 2022.
- Sahli, M. & Tuti, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 81 – 86. doi:<http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v12i2.7934>
- Saputram, N. H., Kholisah, L., & Nuraini, E. (2019). Potensi dan Prospek Wisata Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Kota Bandung). *Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 93 – 102. doi:<https://doi.org/10.54268/baskara.1.2.93-104>
- Satriana, E. D. & Faridah, H. D. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*. 1(2). 31 – 43.
- Sendari, A. A. (2022). Wisata Halal di Indonesia, Pengertian, Konsep, dan Destinasinya. Diperoleh dari <https://hot.liputan6.com/read/4907863/wisata-halal-di-indonesia-pengertian-konsep-dan-destinasinya>. Diakses pada tanggal 12 April 2022.
- Sofyan, Riyanto., dkk (2020). *Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Ulhaq, Zulvikar & Rahmayanti, Mayu. (2020). Panduan Penulisan skripsi Literatur Review. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ulum, Miftahul. (2022). Wisata Halal di Kota Malang Diprotes Warga, Ini Kata Walikota. Diperoleh dari <https://surabaya.bisnis.com/read/20220222/531/1503242/wisata-halal-kota-malang-diprotes-warga-ini-kata-wali-kota>. Diakses pada tanggal 26 April 2022.
- Umiyati, Sri & Tamrin, Husni. (2020). *Pengembangan Wisata Halal, Tanggung Jawab Siapa?* Jakarta Timur: PT Akses Prima Cendekia.